

POLICY BRIEF

Urgensi Penerapan Ekonomi Sosial Solidaritas untuk Palu yang Tangguh, Cerdas, Hijau dan Inklusif

Policy Brief ini dipaparkan pada tanggal 19 September 2023 di Hotel Jazz, Palu dalam kegiatan “**Diseminasi Hasil Penelitian tentang *Social and Solidarity Economy Organizations and Enterprises di Kota Palu***” yang diselenggarakan oleh Yayasan Sikola Mombine bekerjasama dengan Sasakawa Peace Foundation.

Policy Brief ini masih dalam tahap pengembangan analisis yang akan disempurnakan pada cetakan kedua.

Tim Penulis:

Dissa Syakina Ahdanisa | Nur Safitri Lasibani
Fira Tiyasning Tri Utari | Wulan Trisya Lembonunu
Muh. Taufik Hidayat | Gunawan | Maryam



Latar Belakang

Inklusi perempuan dan kelompok minoritas, seperti penyandang disabilitas, dalam kegiatan ekonomi dan kewirausahaan masih menghadapi kendala, terutama bagi pengusaha mikro dan kecil di Indonesia Timur. Kondisi ini sering kali diperparah oleh faktor eksternal seperti bencana alam.

Diketahui bahwa ada lebih dari 352,000 perempuan terdampak bencana alam PASIGALA di tahun 2018. Bencana tersebut juga berdampak bagi 1,771 penyandang disabilitas dan 60,000 keluarga. Lebih dari 3,000 keluarga tersebut memiliki kepala keluarga perempuan¹.

Beberapa studi menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil di daerah terdampak bencana, sebagian besar didominasi oleh perempuan. Data pelaku usaha berdasarkan gender di kota Palu, Sigi dan Donggala menunjukkan bahwa komposisi pelaku usaha adalah perempuan berkisar di ratio 49% - 55%². Selain itu, data dari program pemberdayaan 642 pelaku usaha mikro dan kecil menunjukkan bahwa 20-30% pelaku usaha yang ditemui adalah pelaku usaha disabilitas atau memiliki anggota keluarga disabilitas³.



Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Di Sulawesi Tengah, jumlah UMK mencapai 99,23% dari total jumlah usaha non-pertanian⁴. Sektor ini juga memiliki potensi untuk mengentaskan pengangguran dikarenakan kapasitasnya untuk menyerap tenaga kerja lebih dari 89.74% di Sulawesi Tengah.

Selain itu, di Kota Palu, ada peningkatan jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi COVID sebesar 87%, atau dari 9,000 pelaku usaha ke 69,000 pelaku usaha⁵.

¹ Gender and Inclusion Alert: Sulawesi Earthquake and Tsunami, UN Women, 2018

² Fitriana, F., Munayang, O. H., & Parmita, R. (2021). *Peran perempuan dalam pemulihan ekonomi usaha mikro dan kecil pasca bencana alam Sulawesi Tengah*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 73-88

³ Audiensi dengan Sikola Mombine, Juli 2023

⁴ Potensi Usaha Kecil dan Mikro Sulawesi Tengah, Sensus Ekonomi 2017

https://se2016.bps.go.id/umkumb/files/umkumb/72_Sulawesi%20Tengah/7200_Leaflet_SE2016Lanjutan.pdf

⁵ Data tersebut dapat dilihat dari jumlah penerima bantuan usaha pada saat covid 19 dan pemohon izin usaha dari kelurahan (SKU). FGD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu, Juli 2023

Namun, UMK di Sulawesi Tengah memiliki karakteristik informal. Banyak dari usaha yang ini tidak memiliki status badan hukum, tidak memiliki sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Di Sulawesi Tengah, jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat mendominasi yaitu mencapai lebih dari 91,23 persen⁶.

Selain itu, pengelolaan UMKM dari pemerintah masih belum maksimal. Meski banyak dinas pemerintahan yang berfokus terhadap peningkatan kapasitas dan pelatihan pelaku UMKM, program pemerintah seringkali berulang atau tidak memiliki keberlanjutan yang baik. Sementara itu, karakteristik informal dari pelaku UMKM membatasi akses permodalan untuk berkembang.

Untuk mengatasi hal ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah berfokus pada pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi berbasis komunitas, bukan individu, dengan mengadopsi konsep Ekonomi Solidaritas Sosial atau *Social Solidarity Economy* (SSE).

Apa Itu 'SSE'?

SSE didefinisikan sebagai 'kegiatan ekonomi dan hubungan pasar yang memprioritaskan tujuan sosial (dan sering kali lingkungan) di atas motif keuntungan kapitalis, dan yang dipandu oleh prinsip-prinsip dan praktik-praktik kerjasama, solidaritas, dan demokrasi'⁷.

Istilah ini menjadi populer setelah diadopsinya resolusi: 'Mempromosikan Ekonomi Sosial dan Solidaritas untuk Pembangunan Berkelanjutan' (A/RES/77/281) oleh Majelis Umum PBB pada pertemuan pleno ke-66 pada tanggal 18 April 2023. Adopsi ini juga dipengaruhi oleh diskusi tingkat tinggi pada Konferensi Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization/ILO) pada Juni 2022, yang menghasilkan adopsi resolusi tentang pekerjaan yang layak dan ekonomi sosial dan solidaritas oleh 187 Negara Anggota ILO.

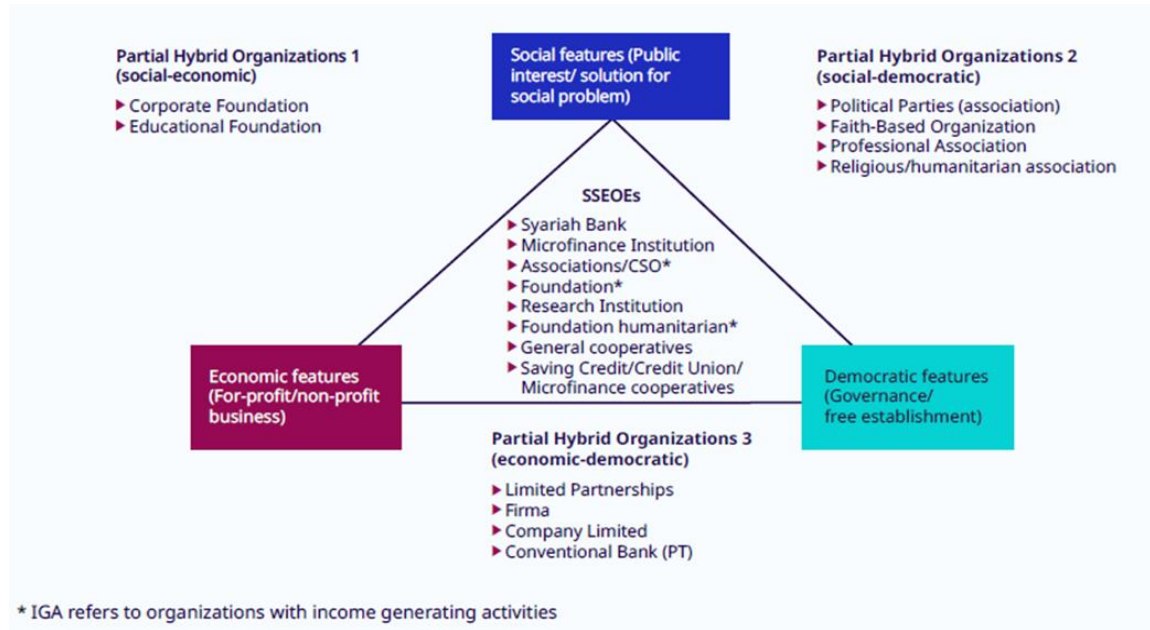
SSE di Indonesia

Asal-usul konsep SSE di Indonesia dapat ditelusuri pada konsep budaya 'Gotong Royong' yang sudah mendarah daging di Indonesia. Landasan hukum dan ideologi SSE adalah UUD 1945 dan Pancasila yang menekankan solidaritas, kejujuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁶ Potensi Usaha Kecil dan Mikro Sulawesi Tengah, Sensus Ekonomi 2017

⁷ Yi, I. (Ed.). (2023). *Encyclopedia of the Social and Solidarity Economy: A Collective Work of the United Nations Inter-Agency Task Force on SSE (UNTFSSSE)*. Edward Elgar Publishing.

Organisasi-organisasi SSE (SSEOs) di Indonesia memiliki tiga komponen di dalam visi dan misinya: sosial, demokrasi dan ekonomi⁸.



Selain itu, organisasi SSE mengamalkan prinsip ‘self-management’ di mana tidak ada dominasi kelompok lain di luar anggota organisasi tersebut⁹.

Mengapa SSE itu penting?

SSE dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya amatlah penting dikarenakan dampaknya bagi ekonomi, sosial, lingkungan serta budaya masyarakat¹⁰.



| | |
|--|---|
| | <p>1. Kontribusi Ekonomi: Organisasi SSE memberikan pekerjaan yang layak terutama bagi anggota masyarakat dari komunitas rentan. Mereka juga mendorong transformasi sosial dengan memperkuat kapasitas produktif kelompok rentan dan terpinggirkan, untuk memerangi kemiskinan dan pengucilan sosial.</p> |
| | <p>2. Kontribusi Sosial: Organisasi SSE dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan, mempromosikan kesetaraan gender¹¹, serta memperluas perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok rentan</p> |

⁸ Data diambil dari artikel ‘Mapping of SSEOs in Indonesia’ oleh ILO, 2021.

⁹ Pemetaan Kelembagaan ESS: Studi Kasus di Indonesia, Dr. Eri Trinurini Adhi, 28 Juli 2021

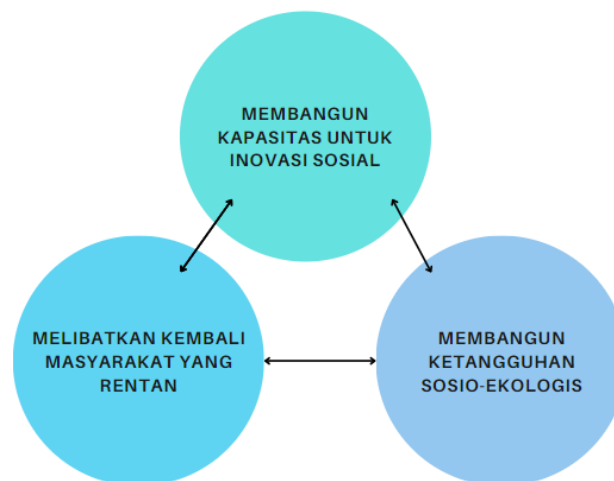
¹⁰ Advancing the 2030 Agenda through the Social and Solidarity Economy, ILO, 2022

¹¹ Beyond pink-collar jobs for women and the social economy, OECD, 2023

| | |
|---|--|
|  | <p>3. Kontribusi terhadap Lingkungan: Mempromosikan produksi yang berkelanjutan terutama di dalam ekonomi sirkular</p> |
|  | <p>4. Kontribusi terhadap Budaya: Memupuk keanekaragaman budaya, mengakui adanya keterkaitan antara kehidupan manusia dan alam</p> |

SSE dapat meningkatkan ketangguhan komunitas (*community resilience*)

Organisasi SSE dapat membantu membangun ketangguhan di dalam masyarakat karena sifatnya yang menjunjung tinggi inovasi sosial. Grafik di bawah ini menunjukkan keterkaitan antara ketangguhan (*resilience*), kerentanan (*vulnerability*), dan inovasi sosial¹².



SSE dan Isu Strategis Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah

Konsep SSE menjadi penting karena dapat menjadi cara untuk membantu mengatasi isu-isu strategis dan mencapai target pembangunan seperti di bawah ini:

1. Mengembangkan ekonomi lokal¹³ dengan pertumbuhan yang inklusif¹⁴ dan adil¹⁵
2. ‘A city for all’: Menciptakan ruang yang aman bagi semua kalangan masyarakat terutama perempuan, penyandang disabilitas dan komunitas rentan¹⁶

¹² Westley, F., & Antadze, N. (2010). Making a difference: Strategies for scaling social innovation for greater impact. *Innovation Journal*, 15(2).

¹³ Isu, Masalah, dan Harapan Warga Kota Palu dalam RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025

¹⁴ Isu strategis rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012-2026

¹⁵ Visi Ekonomi RPJPN Tahun 2005-2025

¹⁶ Visi Pembangunan Jangka Panjang daerah Kota Palu, Kota Untuk Semua (City For All).

3. Menuju Palu Smart City dengan menciptakan lingkungan kota yang inklusif, hijau, tangguh dan pintar¹⁷

Penelitian SSE di Palu sebagai dasar rekomendasi

Untuk memahami bagaimana Organisasi dan Usaha Ekonomi Sosial dan Solidaritas (Social and Solidarity Economy Organizations and Enterprises/SSEOE) berkontribusi dalam proses pembangunan kembali di Palu, Sasakawa Peace Foundation dan Sikola Mombine mengadakan penelitian selama enam bulan. Penelitian ini juga melihat bagaimana SSEOE mendorong inklusi sosial bagi perempuan dan penyandang disabilitas setelah tsunami dan gempa bumi pada tahun 2018 dan Covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui 20 wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah, pengusaha perempuan, dan pengusaha dari komunitas penyandang disabilitas, serta BUMN setempat. Penelitian ini juga dilengkapi dengan diskusi kelompok terfokus kepada 50 responden dari tujuh kategori pemangku kepentingan.

SSE di Palu: Analisa SWOT

Tabel di bawah ini memaparkan tentang kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities) serta ancaman (Threats) yang dihadapi organisasi SSE, pelaku usaha dan instansi-instansi pemerintah, khususnya dalam menggalakkan misi pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Strengths (Kekuatan)

- ‘Nosarara Nosabatutu’: Walaupun konsep SSE dinilai baru, banyak organisasi dan instansi yang paham akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam konsep SSE seperti solidaritas, ekonomi partisipatif dan kepedulian sosial dan sudah mengadopsinya kedalam program mereka
- Bencana sebagai katalis: Bencana alam justru menjadi sebuah pemantik bagi banyak organisasi untuk mulai mengadopsi nilai SSE. Selain itu, banyak organisasi SSE melakukan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana
- Tokoh masyarakat berperan penting untuk menyambungkan program pemerintah dengan kebutuhan di lapangan
- Ada empat jenis program yang sering digunakan oleh organisasi SSE untuk mendukung promosi kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) sebelum dan pasca bencana, yaitu advokasi, pengembangan kapasitas, pemberdayaan ekonomi, serta bantuan langsung

¹⁷Visi Pembangunan Kota Palu: Palu Mantap Bergerak

- Keterlibatan perempuan membuka banyak peluang ekonomi baru bagi organisasi SSE

Weakness (Kelemahan)

- *Siloism*: Setiap instansi pemerintah dan OPD memiliki program masing-masing namun kurangnya koordinasi kadang membuat program menjadi tumpang tindih
- Belum adanya data pelaku usaha yang terpadu
- Belum adanya portal satu pintu untuk mengakses bantuan modal dan kesempatan pelatihan yang dapat diakses khususnya bagi usaha mikro dan kecil
- Belum adanya regulasi yang mengatur batasan jumlah pinjaman serta wilayah kelola lembaga peminjaman uang seperti koperasi simpan pinjam dan microfinance yang berakibat kepada peminjam yang meminjam untuk menutup hutang
- Ketergantungan pelaku usaha dan penerima manfaat terhadap bantuan, serta *charity-mindset* yang masih kental
- Bantuan modal untuk program kewirausahaan yang tidak disertakan dengan pendampingan yang memadai
- Semangat kewirausahaan masyarakat yang masih timbul-tenggelam
- Pelaku usaha yang masih minim literasi digitalnya

Opportunities (Peluang)

- Usia produktif yang mendominasi demografi penduduk kota Palu (sebanyak 257.590 jiwa atau 69,03% total penduduk¹⁸)
- Beragam jenis *marketplace* milik swasta dan pemerintah sebagai pembuka akses ke pasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil
- Sumber daya alam yang berlimpah yang memungkinkan untuk menghasilkan produk usaha yang berlimpah
- Model pendanaan yang beragam seperti dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta dan BUMN, dana KUR, dan model pendanaan program bersama antara pemerintah dengan mitra dalam dan luar negeri
- Kemitraan publik dan swasta yang dapat melanggengkan keberlanjutan program

Threats (Ancaman)

- Stress finansial dikarenakan minimnya literasi keuangan

¹⁸ RPJMD Kota Palu 2021-2026. (2022). Pemerintah Kota Palu. Retrieved September 13, 2023, from <https://bappeda.palukota.go.id/web/wp-content/uploads/2022/08/RPJMD-Kota-Palu-Tahun-2021-2026.pdf>

- Mutasi pejabat atau rotasi jabatan aparat pemerintah daerah yang tidak memiliki kapasitas dan pemahaman mendalam tentang program yang telah direncanakan atau sedang diimplementasikan dapat mengancam keberlanjutan program
- Ancaman lingkungan seperti bencana dan perubahan iklim yang dapat mengurangi lapangan kerja dan mata pencaharian masyarakat

Berdasarkan analisis SWOT, literatur dan temuan penelitian, berikut adalah beberapa kesenjangan (gap) di Kota Palu yang perlu segera diatasi.

Gap #1: Ketimpangan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi¹⁹ namun tidak didukung pemerataan pendapatan di masyarakat²⁰

Gap #2: Ketimpangan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tinggi di level swasta dan pemerintah yang tidak menjangkau ranah usaha mikro dan kecil

Gap #3: Minim Literasi Finansial

Banyaknya bantuan pasca bencana dan pasca COVID19 seputar kewirausahaan yang datang namun pelaku usaha masih rawan terlilit hutang

Gap #4: Kurangnya kemandirian dan ketangguhan kolektif

Usia produktif yang mendominasi namun masih tingginya ketergantungan pada bantuan, disertai dengan *charity mindset* yang masih kental

Usulan dan Rekomendasi

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengambil tindakan yang mendorong pelokalan ekonomi transformatif, meningkatkan rasa kepemilikan di masyarakat dan serta memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan anggota masyarakat rentan lainnya.

Di bawah ini beberapa usulan dan rekomendasi untuk pemerintah Kota Palu untuk mencapai tujuan tersebut serta mengatasi kesenjangan yang ada dengan mengaplikasikan prinsip SSE dan pendekatan secara komunitas.

1. Mendesain akses ke pasar dengan peningkatan kapasitas yang menyeluruh
 - Memfasilitasi akses SSE di Palu untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat e-katalog. Sesuai dengan peraturan yang ada²¹, lembaga pemerintah, non kementerian dan perangkat daerah wajib

¹⁹ rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Palu 2016-2020 sebesar 3,46 % per tahun (Sumber: RPJMD Kota Palu 2021-2026)

²⁰ Gini koefisien Kota Palu 0.33 > Gini koefisien Provinsi Sulawesi Tengah: 0.35 (Sumber: RPJMD Kota Palu 2021-2026)

²¹ Undang Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa. Pemerintah kota dapat memberikan akses bagi UMKM yang mencerminkan nilai SSE untuk dapat menjadi bagian dari proses pengadaan tersebut. Hal ini juga akan mendorong percepatan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)²²

- Melanjutkan proses pembelajaran penerima manfaat dengan sistem 'mentoring' dan 'buddy system' dimana pelaku usaha mikro dapat dipasangkan sebagai supplier bahan baku/olahan bagi pelaku usaha/industri kecil dan menengah.

Dengan sistem ini, pemerintah akan memfasilitasi:

- Peningkatan kapasitas produksi *on-the-job* yang berkelanjutan
- Pertukaran ilmu dan peningkatan motivasi sesama pelaku usaha

Sebagai insentif, pemerintah dapat mengapresiasi pelaku usaha kecil dan menengah yang berhasil:

- Mengikutkan pelaku usaha mikro dan komunitas di dalam *supply chain* usahanya, terutama perempuan dan komunitas rentan
- Mencerminkan nilai-nilai yang berdampak sosial, meningkatkan solidaritas dan kepedulian terhadap lingkungan

- Memberikan akses ke beragam *marketplace*²³ untuk menjangkau pasar yang lebih bervariasi

2. *Commodity for Community*: Memberdayakan masyarakat melalui produksi komoditas lokal untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi secara kolektif²⁴. Untuk ini, pemerintah kota Palu dapat memulai dengan langkah-langkah di bawah ini

- Memetakan potensi komoditas dan sumber daya alam yang ada
- Memetakan siapa saja komunitas yang potensial untuk dibina
- Menganalisa kebutuhan komunitas tersebut untuk dapat mengolah komoditas yang spesifik di tiap komunitas

²² merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan percepatan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

²³ Perlunya koordinasi antar OPD untuk membuka akses bagi para pelaku usaha dan penerima manfaat dari program-program dinas yang berbeda

²⁴ Merujuk kepada gerakan 'One Village One Product (OVOP)' yang dicanangkan oleh pemerintah Jepang dan telah diaplikasikan di berbagai negara.

https://www.jica.go.jp/Resource/english/our_work/types_of_assistance/tech/projects/activities/activities_36.html

3. Memastikan adanya pendidikan literasi finansial yang sesuai dan berkelanjutan di dalam komponen program pendampingan kewirausahaan
4. Mempublikasikan hasil evaluasi program dan pembelajaran yang di dapat secara online untuk mendorong pembelajaran di antara para mitra program, penyandang dana, dan pelaksana program
5. Mewajibkan pengumpulan data terpisah berdasarkan gender dan disabilitas dalam setiap program dan bantuan yang ada di kota Palu

Manfaat bagi Pemerintah Kota Palu

Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana rekomendasi dan usulan di atas dapat membantu Pemerintah Kota Palu mewujudkan Konsep Pembangunan Kota Palu 2021-2026²⁵ yaitu 'Palu Mantap Bergerak' dengan menerapkan konsep pengembangan kota, yaitu Kota Tangguh (resilience city), Kota Hijau (green city), Kota Inklusif (inclusive city) dan Kota Cerdas (smart city).



²⁵ RPJMD Kota Palu 2021-2026. (2022). Pemerintah Kota Palu. Retrieved September 13, 2023, from <https://bappeda.palukota.go.id/web/wp-content/uploads/2022/08/RPJMD-Kota-Palu-Tahun-2021-2026.pdf>

